

LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG

untuk periode berakhir Desember 2021
(Audited)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BPS Kota Bontang, 7 April 2022

Kepala,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang. The stamp contains the text 'BADAN PUSAT STATISTIK' and 'KOTA BONTANG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Widiyantono, S.S.T., M.Stat.
NIP.197901092000121001

II. DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Indeks Singkatan	viii
Struktur Organisasi BPS Kota Bontang Tahun 2021	ix
Laporan Capaian Kinerja Posisi s.d. Desember 2021	x
I. Ringkasan	1
II. Laporaan Realisasi Anggaran	3
III. Neraca	4
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Dasar Hukum	8
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis	10
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4 Basis Akuntansi	12
A.5 Dasar Pengukuran	12
A.6 Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	23
B.2 Belanja	25
B.3 Belanja Pegawai	26
B.4 Belanja Barang	27
B.5 Belanja Modal	28
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29
B.5.2 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	30
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	31
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	31
C.2 Persediaan	31
C.3 Tanah	35
C.4 Peralatan Dan Mesin	36
C.5 Gedung Dan Bangunan	37
C.6 Aset Tetap Lainnya	38
C.7 Akumulasi Penyusutan	39
C.8 Aset Tak Berwujud	40

C.9 Aset Lain-Lain	41
C.10 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	41
C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga	42
C.12 Ekuitas	43
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	44
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	44
D.2 Beban Pegawai	45
D.3 Beban Persediaan	47
D.4 Beban Barang Dan Jasa	47
D.5 Beban Pemeliharaan	51
D.6 Beban Perjalanan Dinas	52
D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	53
D.8 Kegiatan Non Operasional	54
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
E.1 Ekuitas Awal	56
E.2 Surplus/defisit-lo	56
E.3 Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	56
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	57
E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	57
E.4 Transaksi Antar Entitas	57
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)	58
E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	59
E.5 Ekuitas Akhir	59
F. Pengungkapan Lainnya	60

III. DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	15
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 4	Rincian Anggaran	20
Tabel 5	Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja	22
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	23
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan	24
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	25
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja	25
Tabel 10	Perbandingan Belanja Pegawai	26
Tabel 11	Perbandingan Belanja Barang	27
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	28
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30
Tabel 15	Rincian Belanja Dibayar di Muka	31
Tabel 16	Rincian Persediaan	31
Tabel 17	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	39
Tabel 18	Rincian Aset Tak berwujud	40
Tabel 19	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	42
Tabel 20	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	42
Tabel 21	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	44
Tabel 22	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	44
Tabel 23	Rincian Beban Pegawai	45
Tabel 24	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	46
Tabel 25	Rincian Beban Persediaan	47
Tabel 26	Rincian Beban Barang dan Jasa	48
Tabel 27	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	50
Tabel 28	Rincian Beban Pemeliharaan	51
Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	51
Tabel 30	Rincian Beban Perjalanan Dinas	52
Tabel 31	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	53
Tabel 32	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
Tabel 33	Rincian Kegiatan Non Operasional	54
Tabel 34	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	56
Tabel 35	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	57
Tabel 36	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	58
Tabel 37	Rincian Transfer Masuk	59

IV. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Akumulasi Penyusutan A1
Lampiran 2	Rincian KDP A2
Lampiran 3	Laporan SAI
Lampiran 4	CalBMN
Lampiran 5	Laporan Barang Milik Negara (LBMN)
Lampiran 6	BAR
Lampiran 7	Surat Pernyataan Rekening Bendaharawan
Lampiran 8	Rekap Monitoring UP/TUP Satker
Lampiran 9	Rekap Kerjasama dan Hibah
Lampiran 10	MoU dan PKS
Lampiran 11	Rekap Daftar Rekening
Lampiran 12	Rekening Koran Satker
Lampiran 13	Rincian Belanja Barang Persediaan
Lampiran 14	Memo Penyesuaian dan Dokumen Sumber
Lampiran 15	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Lampiran 16	Daftar Bank Garansi dan Jaminan Pemeliharaan
Lampiran 17	Lampiran Lainnya
Lampiran 18	Telaah Laporan Keuangan
Lampiran 19	DIPA Awal dan DIPA Revisi
Lampiran 20	Lampiran A.3 Hibah
Lampiran 21	Lampiran Monitoring Utang Pihak Ketiga
Lampiran 22	Berita Acara Stok Opname Persediaan



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPS Kota Bontang, 7 April 2022

Kepala,



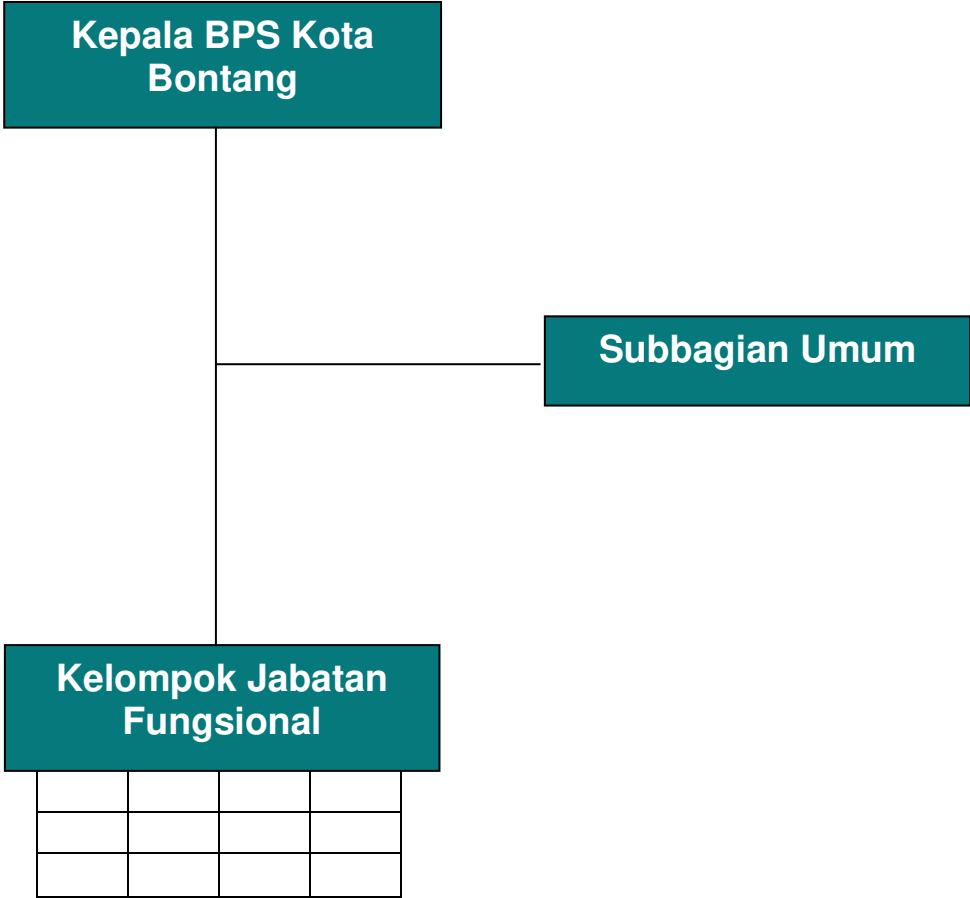
Widiyantono, S.S.T., M.Stat.

NIP.197901092000121001

V. DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA BONTANG PER DESEMBER TAHUN 2021



Sl. No.	Description	2011-12	2012-13	Budget	Actual	Percentage		Remarks
						2012-13	2011-12	
10000	100	100	
10001	100	100	
10002	100	100	
10003	100	100	
10004	100	100	
10005	100	100	
10006	100	100	
10007	100	100	
10008	100	100	
10009	100	100	
10010	100	100	
10011	100	100	
10012	100	100	
10013	100	100	
10014	100	100	
10015	100	100	
10016	100	100	
10017	100	100	
10018	100	100	
10019	100	100	
10020	100	100	
10021	100	100	
10022	100	100	
10023	100	100	
10024	100	100	
10025	100	100	
10026	100	100	
10027	100	100	
10028	100	100	
10029	100	100	
10030	100	100	
10031	100	100	
10032	100	100	
10033	100	100	
10034	100	100	
10035	100	100	
10036	100	100	
10037	100	100	
10038	100	100	
10039	100	100	
10040	100	100	
10041	100	100	
10042	100	100	
10043	100	100	
10044	100	100	
10045	100	100	
10046	100	100	
10047	100	100	
10048	100	100	
10049	100	100	
10050	100	100	

Kode	Uraian	Kategori	Saldo	Kategori	Saldo Awal		Saldo Akhir
					Debet	Kredit	
1000/001/001	Saldo Awal		0				
1000/001/002	Saldo Akhir		0				
1000/001/003	Saldo Awal		0				
1000/001/004	Saldo Akhir		0				
1000/001/005	Saldo Awal		0				
1000/001/006	Saldo Akhir		0				
1000/001/007	Saldo Awal		0				
1000/001/008	Saldo Akhir		0				
1000/001/009	Saldo Awal		0				
1000/001/010	Saldo Akhir		0				
1000/001/011	Saldo Awal		0				
1000/001/012	Saldo Akhir		0				
1000/001/013	Saldo Awal		0				
1000/001/014	Saldo Akhir		0				
1000/001/015	Saldo Awal		0				
1000/001/016	Saldo Akhir		0				
1000/001/017	Saldo Awal		0				
1000/001/018	Saldo Akhir		0				
1000/001/019	Saldo Awal		0				
1000/001/020	Saldo Akhir		0				

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.142.644 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.283.672.559 atau mencapai 99,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.288.010.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.982.052.722 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp111.032.459; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.859.343.753; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp11.676.510.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp106.148.464 dan Rp4.875.904.258.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.921.644, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.457.549.670 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.455.628.026. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.039.750 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.453.588.276.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp5.004.557.850 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4.453.588.276 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp19.347.230 dan Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp4.305.587.454 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp4.875.904.258.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Kota Bontang LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021		% terhadap Anggaran	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	5.142.644	0,00	7.629.437
JUMLAH PENDAPATAN		0	5.142.644	0,00	7.629.437
Belanja Negara	B.2	4.288.010.000	4.283.672.559	99,90	7.418.374.885
Belanja Pegawai	B.3	2.755.740.000	2.753.604.263	99,92	2.540.207.828
Belanja Barang	B.4	1.437.762.000	1.435.571.696	99,85	1.801.270.860
Belanja Modal	B.5	94.508.000	94.496.600	99,99	3.076.896.197
JUMLAH BELANJA		4.288.010.000	4.283.672.559	99,90	7.418.374.885

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. NERACA

BPS Kota Bontang NERACA Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	0	6.246.618
Persediaan	C.2	111.032.459	96.227.955
Jumlah Aset Lancar		111.032.459	102.474.573
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1.504.778.000	1.504.778.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	1.628.021.967	1.533.525.367
Gedung Dan Bangunan	C.5	2.874.089.197	2.874.089.197
Aset Tetap Lainnya	C.6	99.866.871	81.893.464
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.247.412.282)	(1.007.620.078)
Jumlah Aset Tetap		4.859.343.753	4.986.665.950
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	25.700.000	122.538.603
Aset Lain-lain	C.9	2.039.010	0
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(16.062.500)	(105.294.853)
Jumlah Aset Lainnya		11.676.510	17.243.750
JUMLAH ASET		4.982.052.722	5.106.384.273

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	106.148.464	101.826.423
JUMLAH KEWAJIBAN		106.148.464	101.826.423
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	4.875.904.258	5.004.557.850
JUMLAH EKUITAS		4.875.904.258	5.004.557.850
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.982.052.722	5.106.384.273

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Kota Bontang LAPORAN OPERASIONAL Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.921.644	1.937.437
JUMLAH PENDAPATAN		1.921.644	1.937.437
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.757.769.179	2.546.394.675
Beban Persediaan	D.3	105.315.675	201.443.410
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.045.693.148	1.327.403.890
Beban Pemeliharaan	D.5	109.396.810	71.864.866
Beban Perjalanan Dinas	D.6	193.822.841	264.833.313
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	245.552.017	181.385.554
JUMLAH BEBAN		4.457.549.670	4.593.325.708
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.455.628.026)	(4.591.388.271)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	3.003.000	5.692.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.181.250	20.800
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		218.000	377.012
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	139.292
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.039.750	5.908.920
SURPLUS/DEFISIT		(4.453.588.276)	(4.585.479.351)

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Kota Bontang
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas awal	E.1	5.004.557.850	2.022.569.220
Surplus/defisit-LO	E.2	(4.453.588.276)	(4.585.479.351)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	19.347.230	5.444.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	2.781.150	5.444.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	16.566.080	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	4.305.587.454	7.562.023.981
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	4.278.529.915	7.410.745.448
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	27.057.539	151.278.533
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(128.653.592)	2.981.988.630
Ekuitas Akhir	E.5	4.875.904.258	5.004.557.850

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum **A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset

- Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
 30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

- Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
 35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
 36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; dan
 37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Entitas dan
Rencana
Strategis

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kota Bontang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS :

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"

("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkan (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada pengguna dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:
 1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
 2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti

perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;

3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis
Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

BPS Kota Bontang menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan BPS Kota Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kota Bontang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara

nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito

- dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan

nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Bontang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	2.936.625.000	2.755.740.000
BELANJA BARANG	2.101.662.000	1.437.762.000
BELANJA MODAL	0	94.508.000
Jumlah Belanja	5.038.287.000	4.288.010.000

DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 23 November 2020 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0058-7045-7223-7228 dengan total nilai pagu anggaran Rp5.038.287.000 (lima milyar tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Per 31 Desember 2021, BPS Kota Bontang telah melakukan 9 kali revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka penghematan (*self blocking*) dalam rangka dukungan pengendalian Covid-19. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 2717-0004-4925-0422. Total nilai pagu anggaran berubah dari semula Rp 5.038.287.000 (lima milyar tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 4.814.086.000 (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran antar RO dalam satu KRO yang sama dan antar satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan, atau dengan kata lain revisi penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan PPIS yang anggarannya ada di BPS Provinsi Kalimantan Timur, dan juga revisi POK. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021

Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 20 April 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9387-0189-983-8384. Total nilai pagu anggaran berubah dari semula Rp 4.814.086.000 (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 4.890.278.000 (empat milyar delapan ratus Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka revisi anggaran Sensus Penduduk dari BPS RI, penambahan anggaran COVID-19 dan pemeliharaan gedung dan bangunan dari Provinsi, revisi antar RO, revisi POK. Rincian terkait revisi DIPA dijelaskan pada Pengungkapan Lainnya. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 10 Juni 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0236-8046-2865-8639. Total nilai pagu anggaran berubah dari Rp 4.890.278.000 (empat milyar delapan ratus Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 4.879.621.000 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- d. Revisi ke-4 dilakukan dilakukan dalam rangka *refocusing* anggaran BPS dalam rangka dukungan penanganan COVID-19 terutama untuk anggaran SP 2020 lanjutan, dan penyesuaian anggaran belanja pegawai. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 7394-4096-8474-3824. Total nilai pagu anggaran berubah dari semula Rp 4.879.621.000 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 4.215.519.000 (empat milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- e. Revisi ke-5 dilakukan dalam rangka *refocusing* anggaran BPS dalam rangka dukungan penanganan COVID-19. Penambahan biaya Rapid Test Antigen dan PCR bagi seluruh pegawai dan PPNPN. Penyesuaian anggaran belanja pegawai untuk disesuaikan kebutuhan sampai dengan akhir tahun, dihitung secara cermat dan tidak ada cadangan. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0743-8020-3913-0414. Total nilai pagu anggaran berubah dari Rp4.215.519.000 (empat milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp4.238.345.000 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- f. Revisi ke-6 dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran SP2020 serta untuk mendukung kegiatan *Long Form* SP2020, realokasi belanja barang ke belanja modal untuk sarana dan prasarana fisik serta peralatan IT, serta penyesuaian anggaran belanja pegawai untuk disesuaikan kebutuhan sampai dengan akhir tahun. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 8481-1277-9311-3408. Total nilai pagu anggaran berubah dari semula Rp4.238.345.000 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar

- Rp4.288.010.000 (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah).
- g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka pemutakhiran halaman 3 DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 8481-1277-9311-3408. Tidak ada perubahan total nilai pagu anggaran.
 - h. Revisi ke-8 dilakukan dilakukan dalam rangka revisi anggaran pergeseran anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional ke Belanja Barang Operasional dalam rangka optimalisasi anggaran dan Pemutahiran halaman 3 DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 30 November 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0504-0131-6007-2685. Tidak ada perubahan total nilai pagu anggaran.
 - i. Revisi ke-9 dilakukan dilakukan dalam rangka pemutahiran revisi Akhir POK ke Kanwil. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 16 Desember 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0504-0131-6007-2685. Tidak ada perubahan total nilai pagu anggaran.

Rincian setiap Revisi DIPA dijelaskan pada Penjelasan Lainnya.

Tabel 5
Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
BELANJA PEGAWAI	0	0
BELANJA BARANG	0	0
BELANJA MODAL	0	0
BELANJA BARANG	0	0
BELANJA MODAL	0	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.560.678.000	875.766.000
BELANJA BARANG	1.560.678.000	796.848.000
BELANJA MODAL	0	78.918.000
Program Dukungan Manajemen	3.477.609.000	3.412.244.000
BELANJA PEGAWAI	2.936.625.000	2.755.740.000
BELANJA BARANG	540.984.000	640.914.000
BELANJA MODAL	0	15.590.000
Jumlah Belanja	5.038.287.000	4.288.010.000

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi
PNBP
Rp5.142.644

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.142.644 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Pendapatan BPS Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	4.924.644	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	218.000	0,00
Jumlah	0	5.142.644	0,00

Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp4.924.644 terdiri atas: Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya berupa Lelang 1 paket Barang Milik Negara berupa barang inventaris sejumlah 100 unit (kondisi rusak berat) sesuai Risalah Lelang dari KPKNL Bontang No. 2/64/2021 Tgl 15 Maret 2021, sesuai dengan SSPB dengan NTPN nomor: 378212G4UTH18M80 tanggal 16 Maret 2021 senilai Rp3.003.000; dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.921.644 berupa sewa rumah dinas terhitung 12 bulan per 31 Desember 2021.

Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp218.000 diperoleh dari Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian kelebihan uang makan pegawai bulan Desember 2020 sebesar Rp144.000 yang telah disetor pada Januari 2021 sesuai SSPB dengan NTPN nomor: B72C71JNF2OEB0QL tanggal 7 Januari 2021 dan pengembalian kelebihan uang makan pegawai bulan Agustus 2020 sebesar Rp74.000 yang telah disetor pada Maret 2021 sesuai SSPB dengan NTPN nomor: 7E26F61QU7Q8LE6U tanggal 5 Maret 2021.

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021(Rp)	Realisasi 31 Desember 2020(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.924.644	7.628.637	(35,45)
Pendapatan Lain-Lain	218.000	800	27.150,00
Jumlah	5.142.644	7.629.437	(32,59)

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 35,45 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 30 Desember 2020. Penurunan persentase terjadi pada realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yaitu sebesar 35,45 persen dikarenakan adanya perolehan dari lelang barang bongkaran BMN berupa Barang Gedung Kantor Permanen pada per Desember 2020 yang nilainya cukup besar, sedangkan per Desember 2021 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN hanya berupa Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN hasil Lelang 1 paket Barang Milik Negara berupa barang inventaris sejumlah 100 unit (kondisi rusak berat) dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Kemudian untuk Pendapatan Lain-Lain mengalami kenaikan karena Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu per Desember 2021 lebih besar daripada Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu per Desember 2020.

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp4.283.672.559*

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.283.672.559 atau 99,90 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.288.010.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021*

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	2.755.740.000	2.753.604.263	99,92
BELANJA BARANG	1.437.762.000	1.435.571.696	99,85
BELANJA MODAL	94.508.000	94.496.600	99,99
Jumlah Netto	4.288.010.000	4.283.672.559	99,90

*Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 2021 dan 31 Desember 2020*

Tabel Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	2.755.639.913	2.540.394.899	8,47
BELANJA BARANG	1.437.367.696	1.801.770.860	(20,22)
BELANJA MODAL	94.496.600	3.076.896.197	(96,93)
Jumlah Bruto	4.287.504.209	7.419.061.956	(42,21)
Pengembalian Belanja	3.831.650	687.071	457,68
Jumlah	4.283.672.559	7.418.374.885	(42,26)

Realisasi Belanja 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 42,26 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2020.

Anggaran Belanja Pegawai pada TA 2021 sebesar Rp2.755.740.000, hingga 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp2.753.604.263 atau 99,92 persen dari pagu anggaran (telah mencapai target). Realisasi anggaran Belanja Pegawai meningkat sebesar 8,47 persen dibandingkan 31 Desember 2020 antara lain dikarenakan adanya penambahan pegawai sebanyak enam orang pada bulan Mei 2021 serta adanya kegiatan lembur untuk pengecekan kembali SPJ dan dokumen keuangan karena BPS Kota Bontang menjadi sampel BPK.

Anggaran Belanja Barang pada TA 2021 sebesar Rp1.437.762.000, hingga 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp1.435.571.696 atau 99,85 persen dari pagu anggaran (telah mencapai target). Realisasi anggaran Belanja Barang turun sebesar 20,22 persen dibandingkan 31 Desember 2020 secara umum dikarenakan adanya pemberlakuan WFH (*Work From Home*) sebanyak 50 persen di BPS Kota Bontang selama masa pandemi sehingga kebutuhan akan barang konsumsi berkurang.

Anggaran Belanja Modal pada TA 2021 sebesar Rp94.508.000, hingga 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp94.496.600 atau 99,99 persen dari pagu anggaran (telah mencapai target). Realisasi anggaran Belanja Modal turun sebesar 96,93 persen dibandingkan 31 Desember 2020 secara umum dikarenakan adanya pembangunan gedung kantor pada tahun 2020 yang terselesaikan pada akhir tahun 2020. Sehingga pada tahun 2021 sudah tidak ada belanja modal Gedung dan bangunan yang nilainya cukup besar.

Pada TA 2021 terdapat Pengembalian Belanja sebesar Rp3.831.650 dengan rincian pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp2.035.650 dan pengembalian Belanja Barang sebesar Rp1.796.000.

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp2.753.604.263

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.753.604.263 dan Rp2.540.207.828. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.385.466.243	1.286.057.632	7,73
Belanja Lembur	131.572.000	91.975.000	43,05
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.238.601.670	1.162.362.267	6,56
Jumlah Bruto	2.755.639.913	2.540.394.899	8,47
Pengembalian Belanja	2.035.650	187.071	988,17
Jumlah	2.753.604.263	2.540.207.828	8,40

Realisasi Belanja 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,40 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mengalami kenaikan sebesar 7,73 persen dikarenakan adanya pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat dan KGB, serta adanya penambahan pegawai

- mutasi masuk sebanyak enam orang pada bulan Mei 2021.
2. Belanja Lembur per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 43,05 persen dibandingkan 31 Desember 2020 dikarenakan banyaknya kegiatan seperti: Permindok BPK di awal tahun 2021, kegiatan pengecekan kembali SPJ dan dokumen keuangan karena BPS Kota Bontang menjadi sampel BPK, serta padatnya kegiatan pada yang membuat banyak pegawai mengajukan lembur.
 3. Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito mengalami kenaikan sebesar 6,56 persen dibandingkan 31 Desember 2020 dikarenakan adanya mutasi masuk satu pegawai di bulan Agustus dan adanya pengangkatan pegawai fungsional.

Per 31 Desember 2021 terdapat Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp2.035.650 berupa: Pembayaran kekurangan Gaji Bulan Januari-April 2021 untuk 1 pegawai/3 jiwa sesuai SPP Nomor 00055 sebesar Rp740.000; Pembayaran kekurangan Gaji Bulan Agustus 2021 untuk 1 pegawai/2 jiwa sesuai SPP Nomor 00288 sebesar Rp185.000; Pembayaran kekurangan Gaji Bulan Juli s.d. September 2021 untuk 2 pegawai/2 jiwa sesuai SPP Nomor 00289 sebesar Rp1.110.000; dan Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp650.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.435.571.696 Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.435.571.696 dan Rp1.801.270.860.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	415.307.690	364.830.513	13,84
Belanja Barang Non Operasional	551.474.375	753.962.825	(26,86)
Belanja Barang Persediaan	97.204.640	138.208.614	(29,67)
Belanja Jasa	74.303.340	215.195.115	(65,47)
Belanja Pemeliharaan	105.254.810	64.740.480	62,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	193.822.841	264.833.313	(26,81)
Jumlah Bruto	1.437.367.696	1.801.770.860	(20,22)
Pengembalian Belanja	1.796.000	500.000	259,20
Jumlah	1.435.571.696	1.801.270.860	(20,30)

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 20,30 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020. Secara umum, penurunan realisasi Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Barang Jasa terjadi karena BPS Kota Bontang memberlakukan WFH (*Work From Home*) sebanyak 50 persen selama masa pandemi sehingga kebutuhan akan barang konsumsi berkurang. Realisasi Belanja Barang Persediaan mengalami penurunan sebesar 29,67 persen dikarenakan kebutuhan barang konsumsi juga berkurang sebagai akibat penerapan WFH 50 persen. Realisasi Belanja Barang operasional mengalami peningkatan sebesar 13,84 persen dikarenakan adanya peningkatan pembelian belanja keperluan perkantoran. Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 62,58 persen karena adanya penambahan daya listrik dari 16.500 kWh menjadi 33.000 kWh. Sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri mengalami penurunan sebesar 26,81 persen karena pembatasan perjalanan dinas di masa pandemi Covid-19.

Per 31 Desember 2021 terdapat Pengembalian Belanja Barang sebesar Rp1.796.000 berupa: Pengembalian belanja atas SP2D Nomor 210461302004307 Nomor SPM 00072 senilai Rp492.000; dan Pengembalian belanja atas SP2D 210461302002687 Nomor SPM 00038 dan SP2D 210461302002688 Nomor SPM 00039 senilai Rp1.304.000.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp94.496.600

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp94.496.600 dan Rp3.076.896.197. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.496.600	502.179.000	(81,18)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.574.717.197	(100,00)
Jumlah Bruto	94.496.600	3.076.896.197	(96,93)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	94.496.600	3.076.896.197	(96,93)

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2021 sebesar 96,93 persen dibandingkan 31 Desember 2020 disebabkan oleh sudah selesainya pekerjaan revitalisasi Bangunan Gedung Kantor Permanen, kebutuhan meubelair, AC, dan peralatan mesin lainnya pada TA 2020. Belanja Modal pada TA 2021 hanya berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp94.496.600 dan Rp502.179.000.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31
Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.496.600	502.179.000	(81,18)
Jumlah Bruto	94.496.600	502.179.000	(81,18)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	94.496.600	502.179.000	(81,18)

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2021, mengalami penurunan sebesar 81,18 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020 sebesar Rp502.179.000. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terdiri dari: Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*), PC Unit, laptop, monitor, *printer* dan *scanner*.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.002.227.497	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	25.584.300	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	354.105.400	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	192.800.000	(100,00)
Jumlah Bruto	0	2.574.717.197	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	2.574.717.197	(100,00)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020 sebesar Rp2.574.717.197. Hal ini karena sudah selesainya pekerjaan revitalisasi Bangunan Gedung Kantor Permanen per 31 Desember 2021, sehingga pada TA 2021 tidak ada realisasi untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.246.618. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel 15
Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020(Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	6.246.618
Jumlah	0	6.246.618

Kondisi per 31 Desember 2021 sudah tidak ada belanja dibayar dimuka.

C.2 Persediaan

Persediaan Rp111.032.459

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp111.032.459 dan Rp96.227.955. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Barang Konsumsi	109.116.459	95.745.955
Bahan untuk Pemeliharaan	1.916.000	482.000
Jumlah	111.032.459	96.227.955

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2021 dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	96.227.955
Mutasi Tambah :	
Pembelian	97.204.640
Transfer Masuk	27.057.539
Hasil Opname Fisik	29.417
Total Mutasi Tambah :	124.291.596
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	109.487.092
Total Mutasi Kurang :	109.487.092
Kenaikan(Penurunan)	14.804.504
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	111.032.459

Mutasi penambahan persediaan terdiri dari Pembelian, Transfer Masuk, dan Hasil Opname Fisik.

Pembelian Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.204.640 merupakan barang konsumsi senilai Rp91.628.640 dan barang untuk pemeliharaan senilai Rp5.576.000 dengan rincian sebagai berikut.

- Barang Konsumsi berupa: Alat tulis senilai Rp3.108.950; Tinta Tulis, Tinta Stempel senilai Rp Rp151.800; Penjepit Kertas senilai Rp12.971.200; Penghapus/Korektor senilai Rp1.338.150; Ordner dan Map senilai Rp10.017.810; Cutter (Alat Tulis Kantor) senilai Rp451.000; Alat Perekat senilai Rp314.600; Alat Tulis Kantornya senilai Rp2.200.780; Kertas HVS senilai Rp16.820.100; Berbagai Kertas senilai Rp1.135.200; Amplop senilai Rp998.800; Tinta/Toner Printer senilai Rp21.132.100; USB/Flash Disk senilai Rp5.190.900; Mouse senilai Rp7.051.000; Bahan Komputer lainnya senilai Rp7.378.750; Lampu listrik senilai Rp785.000; Stop kontak senilai Rp300.000; Batu Baterai senilai Rp203.500; dan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya senilai Rp79.000.
- Barang Untuk Pemeliharaan berupa: Sapu dan Sikat senilai Rp682.000; Alat-Alat Pel dan Lap senilai Rp2.903.900; Kesen dan Tempat Sampah senilai Rp622.500; Bahan Kimia Untuk Pembersih senilai Rp1.066.400; Pengharum Ruangan senilai Rp52.000; dan Perabot Kantor Lainnya senilai Rp249.200.

Transfer Masuk sebesar Rp27.057.539 merupakan transfer barang persediaan dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa:

1. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Survei Peternakan 2021 senilai Rp27.566 dengan No BAST B-017/BPS/6400.91250/2/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 11 Februari 2021 yang terdiri dari Daftar – RPH/TPH sebanyak 10 set dan Daftar – KPPT sebanyak 12 lembar.
2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Survei Konstruksi 2021 senilai Rp376.213 dengan No BAST B-034/BPS/6400.91250/2/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 26 Februari 2021 yang terdiri dari 100 set Kuesioner Konstruksi Tahunan (SKTH2020), 38 set Kuesioner Konstruksi Triwulanan (SKTR2021), 2 buku Pedoman Survei Konstruksi, 50 set Rekomendasi PU, 50 lembar Surat Pengantar BPS, dan 49 buah Amplop Coklat.
3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Buku Pedoman dan Kuesioner Pelatihan Pendataan Long Form SP2020 senilai Rp11.782.000 dengan No BAST B-043/BPS/6400.92150/9/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 6 September 2021 yang terdiri dari 2 tiras Buku 1 (Pedoman Teknis BPS Kabupaten/Kota), 8 tiras Buku 2A (Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan Wilayah PAPI), 24 tiras Buku 3A (Pedoman Koordinator Tim Wilayah PAPI), 70 tiras Buku 4A (Pedoman Petugas Pendataan Lapangan Wilayah CAPI), 18 tiras Buku 5 (Pedoman Pengkodean), 2 tiras Buku 6 (Pedoman Pelatihan), 74 tiras Kuesioner SP2020-C2, 74 tiras Kuesioner SP2020-RC2, dan 74 tiras Kuesioner SP2020-V.
4. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Survei SKTIR-SKLNP 2021 senilai Rp111.540 dengan No BAST B-052/BPS/6400.92150/11/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 15 November 2021 yang terdiri dari 12 set Kuesioner SKTIR 2021, 1 Buku Pedoman SKTIR 2021, 11 set Kuesioner SKLNP 2021, dan 1 Buku Pedoman SKLNP 2021.
5. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Survei SMAK 2021 senilai Rp49.524 dengan No BAST B-061/BPS/6400.92150/11/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 15 November 2021 yang terdiri dari 31 Eks. Kuesioner SMAK 2021 (I), 14 Eks. Lembar Tambahan Kuesioner SMAK (LTK-SMAK 2021), 7 Eks. Rekap Ekspor (RSMAC2021-I), 1 Eks. Rekap Impor Luar Negeri (RSMAC2021-II).
6. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Dokumen Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Survei Ubinan Tahun 2021 dan Survei IBS senilai Rp483.350 dengan No BAST B-070/BPS/6400.92150/12/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 18 Desember 2021 yang terdiri dari: 80 set Daftar Sub-S Survei Ubinan 2021 (1); 5 buku Daftar SP-Padi 2021; 5

- buku Daftar SP-Palawija 2021; 5 buku Daftar SP-Lahan, SP-ALshintan TP & SP Benih TP 2021; 1 buku Rekapitulasi Kabupaten/Kota SP Tanaman Pangan 2021; 22 set Kues II-A 2020; 10 Lembar Kartu Kendali 2020; 10 Lembar Surat Pengantar 2020; 14 set Amplop Coklat Besar 2020 (2); dan 4 set Piagam dan Map 2020.
7. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Dokumen Pendataan Industri Penggilingan Padi 2020 (PIPA20) senilai Rp44.462 dengan No BAST B-079/BPS/6400.92150/12/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 18 Desember 2021 yang terdiri dari 2 buku pedoman PIPA20-SK, 2 set kuesioner PIPA20-SK, dan 2 set kuesioner PIPA20-SMB.
 8. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Kuesioner Tanaman Pangan senilai Rp175.175 dengan No BAST B-089/BPS/6400.92150/12/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 13 Desember 2021 yang terdiri dari: 82 set Daftar SUB-S Survei Ubinan; 5 buku Daftar SP-Palawija; 5 buku Daftar SP-Lahan SP-Alsintan TP, SP-Benih TP; dan 1 buku Rekap Kab/Kota SP Tanaman Pangan.
 9. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Survei IBS 2021 senilai Rp250.881 dengan No BAST B-098/BPS/6400.92150/12/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 13 Desember 2021 yang terdiri dari 34 set P Kuesioner STPIM-II a (2021), 5 set amplop coklat survei IBS (1), 5 set amplop coklat survei IBS (2), 15 lembar kartu kendali (2), 15 lembar surat pengantar survei IBS (2), 5 set leaflet survei IBS tahunan (Kinerja Sektor Industri Manufaktur Menengah dan Besar), 4 set piagam penghargaan dan tas biru IBS bulanan, 4 set leaflet survei IBS bulanan (Survei Industri Manufahrtur), dan 5 set brosur survei IBS bulanan (Ped.pengisian kuesioner survei IBS bulanan Th.2022).
 10. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Kuesioner Peternakan senilai Rp27.764 dengan No BAST B-107/BPS/6400.92150/12/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 28 Desember 2021 yang terdiri dari 8 set Daftar RPH/TPH 2022 dan 13 lembar Daftar KPPT 2022.
 11. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Kuesioner Susenas 2022 senilai Rp13.065.000 dengan No BAST B-116/BPS/6400.92150/12/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 28 Desember 2021 yang terdiri dari 670 tiras Kuesioner Susenas VSEN22.K dan 670 tiras Kuesioner Susenas VSEN22.KP.
 12. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Barang Persediaan Survei Harga Produsen 2022 senilai Rp407.000

dengan No BAST B-125/BPS/6400.92150/12/BASTP.BMNP/2021 Tanggal 28 Desember 2021 yang terdiri dari 2 tiras Pedoman Pencacahan Survei Harga Produsen (HP) 2022, 1 tiras Pedoman Pemeriksaan Survei Harga Produsen (HP) 2022, 49 tiras Kuesioner HP, 13 tiras Kuesioner HP-JP, dan 5 tiras Suplemen Survei Harga Produsen.

Hasil Opname Fisik berupa Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan rincian: 9 Tiras Daftar PP-TPI senilai Rp25.749 dan 1 Tiras Kuesioner TSL senilai Rp3.668.

Sedangkan mutasi pengurangan persediaan terdiri dari Pemakaian senilai Rp109.487.092. Seluruh barang persediaan dalam kondisi baik dan digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

C.3 Tanah

Tanah
Rp1.504.778.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.504.778.000 dan Rp1.504.778.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	1.504.778.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2021	1.504.778.000

Tanah bangunan rumah negara Gol. I seluas 271 m² senilai Rp129.000.000 yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan untuk rumah dinas Kepala BPS Kota Bontang dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00038 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah Kantor seluas 796 m² senilai Rp292.237.000 yang terletak di Jalan Awang Long, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, bersumber dari pembelian dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00039 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah bangunan rumah dan tanah kantor tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

C.4 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp1.628.021.967*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp1.628.021.967 dan Rp1.533.525.367. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020		1.533.525.367
Mutasi Tambah :		
Saldo Awal	34.788.400	
Pembelian	94.496.600	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	15.316.534	
Total Mutasi Tambah :	144.601.534	
Mutasi Kurang :		
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(34.788.400)	
Transaksi Normalisasi BMN	(15.316.534)	
Total Mutasi Kurang :	(50.104.934)	
Kenaikan(Penurunan)		94.496.600
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021		1.628.021.967
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021		(1.140.268.452)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021		487.753.515

Selama TA 2021 terdapat Mutasi penambahan Peralatan dan Mesin berupa transaksi Saldo Awal, Pembelian, dan Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi. Transaksi Saldo Awal sebesar Rp34.788.400 berupa: Meja Rapat sebanyak 4 unit Rp9.200.000; Vertikal Blind sebanyak 15 unit Rp19.710.000; Gordy/Kray sebanyak 4 unit Rp5.878.400. Transaksi pembelian sebesar Rp94.496.600 terdiri dari: Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) senilai Rp15.581.500; 3 buah PC Unit senilai Rp34.518.000; 1 buah laptop senilai Rp17.649.500; 1 buah monitor senilai Rp1.881.000; 4 buah printer (peralatan personal komputer) senilai Rp18.890.300; dan 1 buah scanner (peralatan personal komputer) senilai Rp5.976.300. Sedangkan Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp15.316.534 berupa 1 buah Printer (Peralatan Personal Komputer) merk EPSON INK JET L1455 yang merupakan normalisasi transaksi saldo awal.

Mutasi pengurangan senilai Rp50.104.934 terdiri dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas dan Transaksi Normalisasi BMN. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp34.788.400 dengan rincian Meja Rapat senilai Rp9.200.000, Vertikal Blind senilai Rp19.710.000, dan Gordyin/Kray senilai Rp5.878.400. Sedangkan Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp15.316.534 berupa 1 buah printer (Peralatan Personal Komputer) yang merupakan normalisasi transaksi koreksi pencatatan.

Peralatan dan Mesin tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

C.5 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan
Rp2.874.089.197*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.874.089.197 dan Rp2.874.089.197. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020		2.874.089.197
Mutasi Tambah :		
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	2.574.717.197	
Total Mutasi Tambah :	<u>2.574.717.197</u>	
Mutasi Kurang :		
Transaksi Normalisasi BMN	(2.574.717.197)	
Total Mutasi Kurang :	<u>(2.574.717.197)</u>	
Kenaikan(Penurunan)		<u>0</u>
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021		2.874.089.197
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021		(107.143.830)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021		2.766.945.367

Gedung dan Bangunan terdiri dari: Bagunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp2.574.717.197; Bangunan Gedung Tempat Tinggal senilai Rp208.480.000; dan Tugu/Tanda Batas senilai Rp90.892.000. Gedung dan Bangunan tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

Mutasi tambah senilai Rp2.574.717.197 merupakan perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang merupakan normalisasi transaksi saldo awal.

Sedangkan Metasi kurang Rp2.574.717.197 merupakan Transaksi Normalisasi BMN berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor yang merupakan normalisasi transaksi koreksi pencatatan.

C.6 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp99.866.871*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp99.866.871 dan Rp81.893.464. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	81.893.464
Mutasi Tambah :	
Saldo Awal	17.231.267
Reklasifikasi Masuk	2.781.150
Total Mutasi Tambah :	20.012.417
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(2.039.010)
Total Mutasi Kurang :	(2.039.010)
Kenaikan(Penurunan)	17.973.407
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	99.866.871
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	99.866.871

Aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak senilai Rp81.893.464. Selama TA 2021 terdapat Reklasifikasi Masuk berupa serial lainnya (buku publikasi BPS) senilai Rp2.781.150 dengan rincian sebagai berikut: Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang 2020 senilai Rp149.600; Publikasi Indikator Ekonomi Kota Bontang senilai Rp199.650; Publikasi Statistik Daerah Kota Bontang 2021 senilai Rp249.700; Publikasi Kota Bontang Dalam Angka 2021 senilai Rp370.000; Publikasi Kecamatan Bontang Selatan Dalam Angka 2021 senilai Rp199.650; Publikasi Kecamatan Bontang Utara Dalam Angka senilai Rp199.650; Publikasi Kecamatan Bontang Barat Dalam Angka senilai Rp199.650; Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2021 senilai Rp199.650; Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat senilai Rp171.600; Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

senilai Rp220.000; Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Menurut Pengeluaran 2016-2020 senilai Rp135.000; dan Publikasi; dan Publikasi Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020 senilai Rp487.000.

Mutasi kurang senilai Rp2.039.010 merupakan Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa: 1 buah monografi senilai Rp48.000; 1 buah laporan senilai Rp19.400; dan 27 serial lainnya senilai Rp1.971.610.

Aset tetap lainnya tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp1.247.412.282*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp1.247.412.282 dan Rp1.007.620.078. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.628.021.967	1.140.268.452	487.753.515
Gedung dan Bangunan	2.874.089.197	107.143.830	2.766.945.367
Aset Tetap Lainnya	99.866.871	0	99.866.871
Jumlah	4.601.978.035	1.247.412.282	3.354.565.753

Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp4.601.978.871 mengalami penyusutan sebesar Rp1.247.412.282 sampai dengan 31 Desember 2021 sehingga Nilai Buku Aset Tetap sampai dengan periode tersebut senilai Rp3.354.565.753. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp25.700.000

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp25.700.000 dan Rp122.538.603. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2021

Uraian	Nilai Perolehan
Software	25.700.000
Jumlah	25.700.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	122.538.603
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(96.838.603)
Total Mutasi Kurang :	(96.838.603)
Kenaikan(Penurunan)	(96.838.603)
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	25.700.000
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	(16.062.500)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	12.850.000

Mutasi pengurangan senilai Rp96.838.603 berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya, yaitu 16 Software Komputer senilai Rp96.838.603 dengan rincian sebagai berikut: 1 software kofax mobile capture/ SDK Devices senilai Rp1.956.233; 1 software kofax mobile capture/ app devices senilai Rp700.319; 2 software anti virus PC dell opticlex senilai Rp291.500; 1 software anti virus/ SC Endpoint senilai Rp215.501; 1 software aplikasi perkantoran/ officeproplus senilai Rp4.070.000; 1 software aplikasi pendukung senilai Rp2.750.000; 1 software Microsoft/windows server standar

2008 R2 OLP senilai Rp6.397.600; 1 software microsoft/SQL server enterprise 2008 R2 OLP senilai Rp69.324.200; 1 software Axway/ Secure Transport senilai Rp7.691.750; dan 6 software TRENDMICRO Smart Protection Complete senilai Rp525.000.

C.9 Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp2.039.010*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.039.010 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	98.877.613
---	------------

Total Mutasi Tambah :	98.877.613
------------------------------	-------------------

Mutasi Kurang :

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(96.838.603)
--	--------------

Total Mutasi Kurang :	(96.838.603)
------------------------------	---------------------

Kenaikan(Penurunan)	2.039.010
----------------------------	------------------

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	2.039.010
---	------------------

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	0
--	----------

Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	2.039.010
--	------------------

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp16.062.500*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp16.062.500 dan Rp105.294.853. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	25.700.000	16.062.500	9.637.500
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2.039.010	0	2.039.010
Jumlah	27.739.010	16.062.500	11.676.510

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp106.148.464

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp106.148.464 dan Rp101.826.423. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kota Bontang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2021 dan 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	104.885.699	100.720.783
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.262.765	1.105.640
Jumlah	106.148.464	101.826.423

Belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp104.885.699 terdiri dari:

1. Kekurangan Gaji bulan Oktober s/d Desember 2021 (Beban Gaji Pokok PNS) senilai Rp363.000.
2. Kekurangan Gaji bulan Oktober s/d Desember 2021 (Beban Tunj.Suami/Istri PNS) senilai Rp36.300.
3. Kekurangan Gaji bulan Oktober s/d Desember 2021 (Beban Tunj.Anak PNS) senilai Rp14.520.
4. Kekurangan Gaji bulan Oktober s/d Desember 2021 (Beban Pembulatan Gaji PNS) senilai Rp222.
5. Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2021 untuk 23 pegawai

senilai Rp104.471.657.

Belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp1.262.765 terdiri dari:

1. Langganan PDAM bulan Desember 2021 senilai Rp204.625.
2. Langganan Telepon bulan Desember 2021 senilai Rp34.070.
3. Langganan Internet bulan Desember 2021 senilai Rp1.024.070.

C.12 Ekuitas

Ekuitas
Rp4.875.904.258

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.875.904.258 dan Rp5.004.557.850. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai ekuitas menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh BPS Kota Bontang pada akhir periode akhir pelaporan yaitu 31 Desember 2021. Nilai ekuitas mengalami penurunan senilai Rp128.653.592 atau sebesar 2,57 persen.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBPNP
Rp1.921.644

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.921.644 dan Rp1.937.437. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 21

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.921.644	1.936.637	(0,77)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	800	(100,00)
Jumlah	1.921.644	1.937.437	(0,82)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp1.921.644 berasal dari sewa rumah dinas pejabat Eselon III selama Januari sampai dengan Desember 2021 yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kota Bontang.

Tabel 22

Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.921.644	1.921.644	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Jumlah	1.921.644	1.921.644	0

Tidak ada perbedaan nilai LO dan LRA pada pendapatan Negara Bukan Pajak.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp2.757.769.179

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.757.769.179 dan Rp2.546.394.675. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 23

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	949.329.720	890.912.600	6,56
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.732	13.608	22,96
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	47.423.430	51.100.144	(7,20)
Beban Tunj. Anak PNS	15.606.250	14.853.028	5,07
Beban Tunj. Struktural PNS	57.600.000	61.920.000	(6,98)
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.940.000	25.765.000	51,14
Beban Tunj. PPh PNS	1.000.663	1.419.681	(29,51)
Beban Tunj. Beras PNS	50.838.840	41.641.500	22,09
Beban Uang Makan PNS	192.034.000	169.780.000	13,11
Beban Tunjangan Umum PNS	31.055.000	28.465.000	9,10
Beban Uang Lembur	131.572.000	91.975.000	43,05
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.242.352.544	1.168.549.114	6,32
Jumlah	2.757.769.179	2.546.394.675	8,30

Secara umum, Beban Pegawai per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan dibandingkan 31 Desember 2020. Hal ini terjadi karena adanya penambahan pegawai mutasi masuk sebanyak enam orang pada bulan Mei 2021 dan adanya pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat serta KGB. Tunjangan Fungsional mengalami peningkatan dikarenakan terdapat penambahan jumlah pegawai fungsional di BPS Kota Bontang. Beban Uang Lembur mengalami kenaikan persentase yang signifikan dikarenakan adanya Permindok BPK di awal tahun

2021, kegiatan pengecekan kembali SPJ dan dokumen keuangan karena BPS Kota Bontang menjadi sampel BPK, serta padatnya kegiatan pada yang membuat banyak pegawai mengajukan lembur.

Tabel 24
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31
Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	949.329.720	948.966.720	363.000
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.732	16.510	222
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	47.423.430	47.387.130	36.300
Beban Tunj. Anak PNS	15.606.250	15.591.730	14.520
Beban Tunj. Struktural PNS	57.600.000	57.600.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.940.000	38.940.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	1.000.663	1.000.663	0
Beban Tunj. Beras PNS	50.838.840	50.838.840	0
Beban Uang Makan PNS	192.034.000	192.034.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	31.055.000	31.055.000	0
Beban Uang Lembur	131.572.000	131.572.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.242.352.544	1.238.601.670	3.750.874
Jumlah	2.757.769.179	2.753.604.263	4.164.916

Penjelasan selisih antara LO dan LRA merupakan jurnal balik awal tahun dan belanja masih harus dibayar per 31 Desember 2021.

Selisih Beban Gaji Pokok PNS senilai Rp363.000, Beban Pembulatan Gaji PNS senilai Rp222, Beban Tunjangan Suami/Istri PNS senilai Rp36.300, dan Beban Tunjangan Anak PNS senilai Rp14.520 merupakan jurnal akrual tagihan kekurangan gaji satu pegawai bulan Oktober-Desember 2021.

Selisih Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) senilai Rp3.750.874 merupakan jurnal akrual tagihan tunjangan kinerja pegawai Desember 2021 sebesar Rp104.471.657 dikurangi jurnal balik tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2020 sebesar Rp100.720.783.

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp105.315.675*

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp105.315.675 dan Rp201.443.410. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 25
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	105.315.675	201.443.410	(47,72)
Jumlah	105.315.675	201.443.410	(47,72)

Beban Persediaan Konsumsi pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar 47,72 persen. Hal ini menunjukkan kebutuhan penggunaan persediaan menurun diakibatkan adanya pelaksanaan WFH (*Work From Home*) pada masa pandemi Covid-19.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.045.693.148*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.045.693.148 dan Rp1.327.403.890. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 26
Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	316.012.630	257.589.475	22,68
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.278.150	1.496.500	(14,59)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.280.000	96.120.000	(10,24)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	11.736.910	9.498.000	23,57
Beban Bahan	73.773.375	169.414.225	(56,45)
Beban Honor Output Kegiatan	449.205.000	570.786.600	(21,30)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	2.675.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	26.700.000	10.587.000	152,20
Beban Langganan Listrik	34.071.500	42.266.296	(19,39)
Beban Langganan Telepon	408.840	718.037	(43,06)
Beban Langganan Air	2.370.125	1.349.375	75,65
Beban Sewa	6.246.618	113.753.382	(94,51)
Beban Jasa Profesi	900.000	5.300.000	(83,02)
Beban Jasa Lainnya	1.620.000	14.000.000	(88,43)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	35.090.000	31.850.000	10,17
Jumlah	1.045.693.148	1.327.403.890	(21,22)

Secara umum, Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi per 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan penerapan WFH (*Work From Home*) sebanyak 50 persen selama masa pandemi Covid-19 di BPS Kota Bontang sehingga kebutuhan akan barang konsumsi berkurang. Hanya Beban Keperluan Perkantoran, Beban Langganan Air, dan Beban terkait penanganan pandemic COVID-19 yang mengalami peningkatan.

Terdapat tiga akun terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, yaitu Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 dan Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19.

1. Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp11.736.910 terdiri dari: Biaya penanganan dan penanggulangan Covid-19 kepada Toko Suryah senilai Rp326.046, kepada Eramart Bontang I senilai Rp624.064, kepada Toko Cahaya Izza senilai Rp1.188.000, pembelian masker kepada toko cahaya izza senilai Rp6.600.000, pembelian keperluan sehari-hari perkantoran berupa masker kepada toko suryah senilai Rp976.800, dan pembelian masker pada toko cahaya izza senilai Rp1.122.000.
2. Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp26.700.000 terdiri dari: Pembayaran perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas Susenas Maret 2021 dalam rangka Pandemi COVID-19 senilai Rp2.200.000, APD untuk petugas SKPPRL senilai Rp450.000, APD untuk petugas IMK tahunan senilai Rp850.000, APD untuk petugas IMK triwulanan senilai Rp200.000, APD untuk petugas Survei Konstruksi senilai Rp250.000, APD untuk petugas SPTK senilai Rp500.000, Biaya komunikasi SPTK senilai Rp1.500.000, APD untuk petugas sktnp senilai Rp150.000, Biaya komunikasi SKTNP senilai Rp 150.000, APD untuk pegawai Podes senilai Rp 400.000, Biaya komunikasi Podes senilai Rp1.200.000, APD untuk petugas Sakernas Februari senilai Rp1.350.000, APD untuk petugas Sakernas Tahunan senilai Rp5.250.000, APD untuk petugas SITASI senilai Rp1.550.000, Biaya komunikasi SITASI senilai Rp4.050.000, masker untuk responden susenas MSBP senilai Rp1.300.000, APD untuk petugas susenas MSBP senilai Rp500.000, Biaya APD petugas ke toko cahaya izza senilai Rp250.000, Biaya APD petugas ke toko izza senilai Rp1.250.000, Biaya APD petugas ke toko caya izza senilai Rp150.000, biaya komunikasi pelatihan senilai Rp2.300.000, dan biaya komunikasi pelatihan senilai Rp200.000.
3. Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp31.155.000 terdiri dari: Biaya *rapid test* petugas Susenas Maret 2021 senilai Rp10.340.000, Biaya *rapid test* petugas SPTK senilai Rp1.950.000, Biaya *rapid test* petugas Podes senilai Rp1.365.000, Biaya *rapid test* petugas Sakernas tahunan senilai Rp4.485.000, Biaya *rapid test*/PCR pegawai senilai Rp13.015.000, Biaya *rapid test* petugas susenas MSBP senilai Rp1.100.000, dan Biaya *rapid test* petugas senilai Rp2.507.000.

Tabel 27
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	316.012.630	316.012.630	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.278.150	1.278.150	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.280.000	86.280.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	11.736.910	11.736.910	0
Beban Bahan	73.773.375	73.773.375	0
Beban Honor Output Kegiatan	449.205.000	449.205.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	26.700.000	26.700.000	0
Beban Langganan Listrik	34.071.500	34.071.500	0
Beban Langganan Telepon	408.840	408.840	0
Beban Langganan Air	2.370.125	2.213.000	157.125
Beban Sewa	6.246.618	0	6.246.618
Beban Jasa Profesi	900.000	900.000	0
Beban Jasa Lainnya	1.620.000	1.620.000	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	35.090.000	35.090.000	0
Jumlah	1.045.693.148	1.039.289.405	6.403.743

Penjelasan selisih antara nilai LO dan LRA merupakan selisih akrual belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 dikurangi jurnal balik belanja yang masih harus dibayar tahun 2020 di awal tahun 2021, Adapun selisih terdapat pada:

1. Beban Langganan Air: Akrual per 31 Desember 2021 Rp204.625 dikurangi jurnal balik awal tahun Rp47.500 menjadi Rp157.125.
2. Beban sewa: Akrual per 31 Desember 2021 Rp0 dikurangi jurnal balik awal tahun Rp6.246.618 menjadi Rp6.246.618.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp109.396.810*

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp109.396.810 dan Rp71.864.866. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 28
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.555.900	0	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	950.000	600.000	58,33
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.748.910	64.140.480	(9,96)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.142.000	7.124.386	(41,86)
Jumlah	109.396.810	71.864.866	52,23

Beban Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 9,96 persen dikarenakan BMN masih dalam kondisi baik dan hanya sedikit BMN dengan kondisi rusak ringan.

*Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31
Desember 2021*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.555.900	46.555.900	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	950.000	950.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.748.910	57.748.910	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.142.000	0	4.142.000
Jumlah	109.396.810	105.254.810	4.142.000

Beban pemeliharaan senilai Rp4.142.000 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Terdapat satu akun terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, yaitu Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp950.00 yang merupakan pembuatan tempat cuci tangan.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas Rp193.822.841*

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp193.822.841 dan Rp264.833.313. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Tabel 30
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	131.052.841	91.854.313	42,67
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.770.000	83.730.000	(25,03)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	85.734.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3.515.000	(100,00)
Jumlah	193.822.841	264.833.313	(26,81)

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 25,03 persen disebabkan oleh adanya pembatasan untuk melaksanakan perjalanan dinas pada masa pandemi Covid-19.

Tabel 31
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	131.052.841	131.052.841	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.770.000	62.770.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah	193.822.841	193.822.841	0

Tidak ada perbedaan nilai LO dan LRA pada beban perjalanan dinas.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp245.552.017

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp245.552.017 dan Rp181.385.554. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 32
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	181.013.717	142.061.849	27,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.113.300	32.111.205	80,98
Beban Amortisasi Software	6.425.000	7.212.500	(10,92)
Jumlah	245.552.017	181.385.554	35,38

D.8 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp2.039.750*

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 33
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020*

Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.003.000	4.617.000	(34,96)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	1.181.250	20.800	5.579,09
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	218.000	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	305.840	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	34.792	(100,00)
Jumlah	2.039.750	4.867.248	(58,09)

Rincian Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya berupa Lelang 1 paket Barang Milik Negara berupa barang inventaris sejumlah 100 unit (kondisi rusak berat) sesuai Risalah Lelang dari KPKNL Bontang No. 2/64/2021 Tgl 15 Maret 2021, sesuai dengan SSPB dengan NTPN nomor: 378212G4UTH18M80 tanggal 16 Maret 2021 senilai Rp3.003.000. Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp1.181.250 merupakan nilai dari usulan penyusutan asset tak berwujud. Kemudian Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu pada kondisi 31 Desember 2021 sebesar Rp218.000 berupa pengembalian kelebihan uang makan pegawai bulan Desember 2020 sebesar Rp144.000 yang telah disetor pada Januari 2021 sesuai SSPB dengan NTPN nomor: B72C71JNF2OEB0QL tanggal 7 Januari 2021 dan pengembalian kelebihan uang makan pegawai bulan Agustus 2020 sebesar

Rp74.000 yang telah disetor pada Maret 2021 sesuai SSPB dengan NTPN nomor: 7E26F61QU7Q8LE6U tanggal 5 Maret 2021.

Pendapatan dan beban Penyesuaian Nilai Persediaan kondisi 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Tidak adanya nilai Pendapatan dan beban Penyesuaian Nilai Persediaan karena dalam pelaporan semester 1 TA 2021 sudah menggunakan Aplikasi Persediaan versi 21.0.0 (Aplikasi Persediaan FIFO) sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode *First In First Out* (FIFO), bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp5.004.557.850

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.004.557.850 dan Rp2.022.569.220. Nilai Ekuitas Awal tersebut mengalami peningkatan pada 1 Januari 2021 apabila dibandingkan dengan 1 Januari 2020.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp4.453.588.276

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.453.588.276 dan Rp4.585.479.351. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.347.230 dan Rp5.444.000. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020(Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	2.781.150	5.444.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	16.566.080	0
Jumlah	19.347.230	5.444.000

Pada 31 Desember 2021 terdapat koreksi yang dapat menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp2.781.150 merupakan reklasifikasi masuk aset tetap lainnya berupa pencatatan buku publikasi.

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp2.781.150*

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.781.150 dan Rp5.444.000. Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp2.781.150 merupakan reklasifikasi masuk aset tetap lainnya berupa pencatatan buku publikasi.

E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp16.566.080*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.566.080 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Tabel 35
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021*

Tabel Jenis Aset Tetap	Tabel Nilai Koreksi(Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(410.264)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(254.923)
Aset Tetap Lainnya	17.231.267
Jumlah	16.566.080

*) nilai minus pada tabel didefinisikan koreksi pada aset tersebut merupakan koreksi pengurangan

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi merupakan aset tetap lainnya berupa serial lainnya (buku publikasi BPS). Rincian lebih lengkap terdapat pada lampiran laporan keuangan ini.

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp4.305.587.454*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.305.587.454 dan Rp7.562.023.981. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 36
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020(Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.283.672.559	7.418.374.885
Diterima dari Entitas Lain	(5.142.644)	(7.629.437)
Transfer Keluar	0	(3.549.236)
Transfer Masuk	27.057.539	154.827.769
Jumlah	4.305.587.454	7.562.023.981

Transaksi yang ditagihkan ke entitas lain senilai Rp4.283.672.559 merupakan realisasi anggaran yang diajukan ke KPPN Samarinda s.d. 31 Desember 2021. Transaksi yang diterima dari entitas lain sebesar Rp5.142.644 merupakan jumlah pendapatan dari Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya berupa Lelang 1 paket Barang Milik Negara berupa barang inventaris sejumlah 100 unit (kondisi rusak berat) sesuai Risalah Lelang dari KPKNL Bontang No. 2/64/2021 Tgl 15 Maret 2021, sesuai dengan SSPB dengan NTPN nomor: 378212G4UTH18M80 tanggal 16 Maret 2021 senilai Rp3.003.000; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.921.644 berupa sewa rumah dinas terhitung 12 bulan per 31 Desember 2021. Sedangkan Transfer Masuk senilai Rp27.057.539 merupakan barang konsumsi.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar minus Rp5.142.644 sedangkan DKEL sebesar Rp4.283.672.559.

Nilai Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp5.142.644 merupakan jumlah pendapatan dari Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya berupa Lelang 1 paket Barang Milik Negara berupa barang inventaris sejumlah 100 unit (kondisi rusak berat senilai Rp3.003.000; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.921.644 berupa sewa rumah dinas terhitung 12 bulan per 31 Desember 2021; dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp 218.000 diperoleh dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu.

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp4.283.672.559 berasal dari realisasi belanja hingga 31 Desember 2021 dengan

rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.753.604.263, realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.435.571.696, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp94.496.600.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp27.057.539. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

*Tabel 37
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2021*

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	27.057.539	0	27.057.539
Jumlah		27.057.539	0	27.057.539

Transfer Masuk dari BPS Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp27.057.539 merupakan barang konsumsi berupa Barang Persediaan Survei Peternakan 2021 senilai Rp27.566, Barang Persediaan Survei Konstruksi 2021 senilai Rp376.213, Barang Persediaan berupa Buku Pedoman dan Kuesioner Pelatihan Pendataan Long Form SP2020 senilai Rp11.782.000, Barang Persediaan Survei SKTIR-SKLNP 2021 senilai Rp111.540, Barang Persediaan Survei SMAK 2021 senilai Rp49.524, Barang Persediaan Dokumen Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Survei Ubinan Tahun 2021 dan Survei IBS senilai Rp483.350, Barang Persediaan Dokumen Pendataan Industri Penggilingan Padi 2020 (PIPA20) senilai Rp44.462, Barang Persediaan Kuesioner Tanaman Pangan senilai Rp175.175, Barang Persediaan Survei IBS 2021 senilai Rp250.881, Barang Persediaan Kuesioner Peternakan senilai Rp27.764, Barang Persediaan Kuesioner Susenas 2022 senilai Rp13.065.000, dan Barang Persediaan Survei Harga Produsen 2022 senilai Rp407.000.

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp4.875.904.258*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.875.904.258 dan Rp5.004.557.850.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 071/SK/KPA/2020 Tentang Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Desember 2020, pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2021 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	:	Fathul Jannah, S.E., M.Si.
Bendahara	:	Cristine Uli Arta, S.Si.
Pengurus/ Penyimpan BMN	:	Eny Berty Br Ginting, SST.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 024/6474/2021 Tentang Perubahan I Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 071/SK/KPA/2020 Tentang Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 tanggal 1 Maret 2021, dilakukan penggantian Pengurus/ Penyimpan BMN dikarenakan pejabat sebelumnya dipindah tugaskan ke satker lain menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	:	Fathul Jannah, S.E., M.Si.
Bendahara	:	Cristine Uli Arta, S.Si.
Pengurus/ Penyimpan BMN	:	Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 043/6474/2021 Tentang Perubahan II Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 071/SK/KPA/2020 Tentang Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 April 2021, dilakukan penggantian Bendahara dikarenakan pejabat sebelumnya dipindah tugaskan ke satker lain menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	:	Fathul Jannah, S.E., M.Si.
Bendahara	:	Tania Viona Sirait, S.Tr.Stat.
Pengurus/ Penyimpan BMN	:	Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.

2. BPS Kota Bontang memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran BPG 046 BPS KOTA BONTANG di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK-KK BONTANG AHMAD YANI dengan No.rek 1480011154344 berdasarkan persetujuan rekening dari KPPN Samarinda No. S-0772/WPB.020./KP.046/ 2015 tanggal 24 Maret 2015.
3. BPS Kota Bontang tidak memiliki kerjasama dari pihak lain selama Tahun Anggaran 2021.
4. DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2021 tanggal 23 November 2020 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0058-7045-7223-7228 dengan

total nilai pagu anggaran Rp 5.038.287.000 (lima milyar tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Per 30 Juni 2021, BPS Kota Bontang telah melakukan 3 kali revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka penghematan (*self blocking*) dalam rangka dukungan pengendalian Covid-19.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,800,000	1,800,000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	24,340,000	18,770,000	- 5,570,000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31,733,000	31,733,000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	5,404,000	5,404,000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	5,448,000	5,178,000	- 270,000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	8,710,000	8,710,000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	69,423,000	68,343,000	- 1,080,000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	169,714,000	136,624,000	- 33,090,000
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	651,651,000	627,484,000	- 24,167,000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	294,367,000	215,082,000	- 79,285,000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	55,360,000	42,417,000	- 12,943,000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	15,214,000	14,944,000	- 270,000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	187,142,000	120,156,000	- 66,986,000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	2,835,000	2,835,000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	36,727,000	36,187,000	- 540,000
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,446,737,000	3,446,737,000	-
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	6,476,000	6,476,000	-
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	14,400,000	14,400,000	-
Total		5,038,287,000	4,814,086,000	- 224,201,000

- b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran antar RO dalam satu KRO yang sama dan antar satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan, atau dengan kata lain revisi penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan PPIS yang anggarannya ada di BPS Provinsi Kalimantan Timur, dan juga revisi POK.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,800,000	1,800,000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	18,770,000	18,770,000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31,733,000	35,480,000	3,747,000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	5,404,000	28,402,000	22,998,000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	5,178,000	11,662,000	6,484,000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	8,710,000	26,762,000	18,052,000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	68,343,000	70,476,000	2,133,000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	136,624,000	136,624,000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	627,484,000	627,484,000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	215,082,000	223,060,000	7,978,000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	42,417,000	44,367,000	1,950,000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	14,944,000	14,944,000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	120,156,000	133,006,000	12,850,000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	2,835,000	2,835,000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	36,187,000	36,187,000	-
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,446,737,000	3,446,737,000	-
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	6,476,000	6,476,000	-
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	14,400,000	14,400,000	-
Total		4,814,086,000	4,890,278,000	76,192,000

- c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka revisi anggaran Sensus Penduduk dari BPS RI, penambahan anggaran COVID-19 dan pemeliharaan gedung dan bangunan dari Provinsi, revisi antar RO, revisi POK.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,800,000	1,800,000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	18,770,000	18,770,000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	35,480,000	35,480,000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	28,402,000	28,402,000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	11,662,000	11,526,000	- 136,000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	26,762,000	26,178,000	- 584,000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	70,476,000	80,644,000	10,168,000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	136,624,000	136,624,000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	627,484,000	754,473,000	126,989,000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	223,060,000	227,892,000	4,832,000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	44,367,000	44,367,000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	14,944,000	15,664,000	720,000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	133,006,000	133,006,000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	2,835,000	2,835,000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	36,187,000	36,187,000	-
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,446,737,000	3,284,601,000	- 162,136,000
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	6,476,000	6,476,000	-
2886.EAF	Layanan SDM	-	9,490,000	9,490,000
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	14,400,000	14,400,000	-
Total		4,890,278,000	4,879,621,000	- 10,657,000

- d. Revisi ke-4 dilakukan dalam rangka *refocusing* anggaran BPS dalam rangka dukungan penanganan COVID-19 terutama untuk anggaran SP 2020 lanjutan, dan penyesuaian anggaran belanja pegawai.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,800,000	1,800,000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	18,770,000	18,770,000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	35,480,000	35,480,000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	28,402,000	28,402,000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	11,526,000	11,526,000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	26,178,000	26,178,000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	80,644,000	80,644,000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	136,624,000	136,624,000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	754,473,000	19,120,000	- 735,353,000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	227,892,000	227,892,000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	44,367,000	44,367,000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	15,664,000	15,664,000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	133,006,000	133,006,000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	2,835,000	2,835,000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	36,187,000	36,187,000	-
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,284,601,000	3,355,852,000	71,251,000
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	6,476,000	6,476,000	-
2886.EAF	Layanan SDM	9,490,000	9,490,000	-
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	14,400,000	14,400,000	-
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,800,000	1,800,000	-
Total		4,879,621,000	4,215,519,000	- 664,102,000

- e. Revisi ke-5 dilakukan dalam rangka *refocusing* anggaran BPS dalam rangka dukungan penanganan COVID-19. Penambahan biaya Rapid Test Antigen dan PCR bagi seluruh pegawai dan PPNPN. Penyesuaian anggaran belanja pegawai untuk disesuaikan kebutuhan sampai dengan akhir tahun, dihitung secara cermat dan tidak ada cadangan.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,800,000	3,958,000	2,158,000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	18,770,000	20,730,000	1,960,000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	35,480,000	36,180,000	700,000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	28,402,000	29,012,000	610,000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	11,526,000	13,276,000	1,750,000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	26,178,000	29,178,000	3,000,000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	80,644,000	87,492,000	6,848,000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	136,624,000	126,595,000	- 10,029,000
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	19,120,000	19,120,000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	227,892,000	195,734,000	- 32,158,000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	44,367,000	44,367,000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	15,664,000	19,164,000	3,500,000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	133,006,000	156,257,000	23,251,000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	2,835,000	6,041,000	3,206,000
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	36,187,000	38,187,000	2,000,000
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,355,852,000	3,333,852,000	- 22,000,000
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	6,476,000	5,626,000	- 850,000
2886.EAF	Layanan SDM	9,490,000	53,720,000	44,230,000
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	14,400,000	9,050,000	- 5,350,000
Total		4,215,519,000	4,238,345,000	22,826,000

- f. Revisi ke-6 dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran SP 2020 serta untuk mendukung kegiatan Long Form SP2020. Realokasi belanja barang ke belanja modal untuk sarana dan prasarana fisik serta peralatan IT. Penyesuaian anggaran belanja pegawai untuk disesuaikan kebutuhan sampai dengan akhir tahun.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,958,000	3,958,000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	20,730,000	17,825,000	- 2,905,000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36,180,000	33,064,000	- 3,116,000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	29,012,000	26,534,000	- 2,478,000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2901.BMA	Data dan Informasi Publik		75,823,000	75,823,000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	13,276,000	10,791,000	- 2,485,000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	29,178,000	23,294,000	- 5,884,000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	87,492,000	87,492,000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	126,595,000	101,522,000	- 25,073,000
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	19,120,000	68,785,000	49,665,000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	195,734,000	182,342,000	- 13,392,000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	44,367,000	36,264,000	- 8,103,000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	19,164,000	19,164,000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	156,257,000	147,092,000	- 9,165,000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	6,041,000	2,819,000	- 3,222,000
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	38,187,000	38,187,000	-
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,333,852,000	3,333,852,000	-
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	5,626,000	10,000	- 5,616,000
2886.EAD	Layanan Sarana Internal	-	15,590,000	15,590,000
2886.EAF	Layanan SDM	53,720,000	43,796,000	- 9,924,000
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	9,050,000	9,000,000	- 50,000
Total		4,238,345,000	4,288,010,000	49,665,000

- g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran SP 2020 serta untuk mendukung kegiatan Long Form SP2020. Realokasi belanja barang ke belanja modal untuk sarana dan prasarana fisik serta peralatan IT. Penyesuaian anggaran belanja pegawai untuk disesuaikan kebutuhan sampai dengan akhir tahun.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,958,000	3,958,000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	20,730,000	17,825,000	- 2,905,000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36,180,000	33,064,000	- 3,116,000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	29,012,000	26,534,000	- 2,478,000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2901.BMA	Data dan Informasi Publik		75,823,000	75,823,000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	13,276,000	10,791,000	- 2,485,000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	29,178,000	23,294,000	- 5,884,000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	87,492,000	87,492,000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	126,595,000	101,522,000	- 25,073,000
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	19,120,000	68,785,000	49,665,000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	195,734,000	182,342,000	- 13,392,000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	44,367,000	36,264,000	- 8,103,000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	19,164,000	19,164,000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	156,257,000	147,092,000	- 9,165,000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	6,041,000	2,819,000	- 3,222,000
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	38,187,000	38,187,000	-
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,333,852,000	3,333,852,000	-
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	5,626,000	10,000	- 5,616,000
2886.EAD	Layanan Sarana Internal	-	15,590,000	15,590,000
2886.EAF	Layanan SDM	53,720,000	43,796,000	- 9,924,000
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	9,050,000	9,000,000	- 50,000
Total		4,238,345,000	4,288,010,000	49,665,000

- h. Revisi ke-8 dilakukan dalam rangka revisi anggaran pergeseran anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional ke Belanja Barang Operasional dalam rangka optimalisasi anggaran dan Pemutahiran Halaman 3 DIPA

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,958,000	3,958,000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	17,825,000	17,825,000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	33,064,000	33,064,000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	26,534,000	26,534,000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2901.BMA	Data dan Informasi Publik	75,823,000	75,823,000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	10,791,000	10,791,000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	23,294,000	23,294,000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	87,492,000	87,492,000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	101,522,000	101,522,000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	68,785,000	68,785,000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	182,342,000	182,342,000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	36,264,000	36,264,000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	19,164,000	19,164,000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	147,092,000	147,092,000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	2,819,000	2,819,000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	38,187,000	38,187,000	-
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,333,852,000	3,333,852,000	-
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	10,000	10,000	-
2886.EAD	Layanan Sarana Internal	15,590,000	15,590,000	-
2886.EAF	Layanan SDM	43,796,000	43,796,000	-
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	9,000,000	9,000,000	-
Total		4,288,010,000	4,288,010,000	-

- i. Revisi ke-9 dilakukan dalam rangka dilakukan dalam rangka pemutahiran revisi Akhir POK ke Kanwil.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,958,000	3,958,000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	17,825,000	17,825,000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	33,064,000	33,064,000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	26,534,000	26,534,000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	810,000	810,000	-
2901.BMA	Data dan Informasi Publik	75,823,000	75,823,000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	10,791,000	10,791,000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	23,294,000	23,294,000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	87,492,000	87,492,000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	101,522,000	101,522,000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	68,785,000	68,785,000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	182,342,000	182,342,000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	36,264,000	36,264,000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	19,164,000	19,164,000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	147,092,000	147,092,000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	2,819,000	2,819,000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	38,187,000	38,187,000	-
2886.EAA	Layanan Perkantoran	3,333,852,000	3,333,852,000	-
2886.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9,996,000	9,996,000	-
2886.EAC	Layanan Umum	10,000	10,000	-
2886.EAD	Layanan Sarana Internal	15,590,000	15,590,000	-
2886.EAF	Layanan SDM	43,796,000	43,796,000	-
2886.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	9,000,000	9,000,000	-
Total		4,288,010,000	4,288,010,000	-